

## Rasionalitas Pemilih Urban: Studi Pilihan Kotak Kosong Dalam Pilkada Kota Makassar 2018

Maqbul Halim<sup>1</sup>, Tahir Kasnawi<sup>2</sup>, Rahmat Muhammad<sup>3</sup>, Pratiwi Wulandari<sup>4</sup>, Muhammad  
Al-Khahfi Akhmad<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Hasanuddin

<sup>5</sup>Universitas Negeri Makassar

E-mail: maqbulhalim@gmail.com<sup>1</sup>, rahmatmuhammad131@gmail.com<sup>3</sup>,  
Pratiwiwulandari21@gmail.com<sup>4</sup>, m.alkhahfi.akhmad@unm.ac.id<sup>5</sup>

---

### Article History:

Received: 15 September 2025

Revised: 24 September 2025

Accepted: 30 September 2025

**Keywords:** Kotak Kosong, Teori Pilihan Rasional, Perilaku Elektoral, Demokrasi Lokal, Pemilihan Walikota Makassar

**Abstract:** Pemilihan Wali Kota Makassar 2018 menghadirkan anomali dalam sejarah pemilu Indonesia, ketika kotak suara kosong memenangkan pemungutan suara melawan satu-satunya kandidat. Penelitian ini mengeksplorasi motivasi di balik pilihan warga Makassar tersebut, dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan. Menggunakan teori pilihan rasional James Coleman, hasil penelitian mengungkap enam motivasi utama: (1) keinginan akan calon pemimpin yang lebih baik di masa depan, (2) ketidakpuasan terhadap visi dan program kandidat, (3) partisipasi dalam kampanye kotak kosong yang berbasis akar rumput, (4) keraguan terhadap kapasitas kepemimpinan kandidat, (5) pengaruh keluarga dan jejaring sosial dalam membentuk pilihan politik, serta (6) penolakan terhadap politik dinasti. Temuan ini menunjukkan meningkatnya kesadaran politik pemilih urban serta penggunaan strategi elektoral sebagai sarana untuk menuntut kualitas kepemimpinan yang lebih baik. Studi ini berkontribusi pada pemahaman rasionalitas pemilih, dinamika elektoral, serta pentingnya gerakan akar rumput dalam memperkuat demokrasi lokal. Rekomendasi kebijakan juga ditawarkan untuk mendorong persaingan elektoral yang sehat dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan daerah.

---

## PENDAHULUAN

Pilkada Kota Makassar tahun 2018 menghadirkan fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia, di mana kotak kosong berhasil mengalahkan pasangan calon tunggal. Kemenangan kotak kosong ini menunjukkan adanya dinamika politik yang kompleks dan unik di Kota Makassar, yang perlu dipahami secara mendalam.

Fenomena kotak kosong dalam pilkada bukanlah hal yang baru dalam konteks demokrasi Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh Mahardika (2021), kotak kosong merupakan pilihan yang

---

tersedia ketika hanya ada satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah. Dalam konteks teoretis, fenomena ini memiliki implikasi yang mendalam terhadap legitimasi politik dan kualitas demokrasi lokal.

Dari perspektif teori demokrasi, fenomena kotak kosong mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap calon yang diajukan dan menunjukkan adanya hambatan dalam partisipasi politik yang sehat. Sebagaimana dikemukakan oleh Maate (2018), demokrasi lokal dan otonomi daerah merupakan dua elemen politik yang dalam sistem tata negara, terus menjadi hal yang sering mempengaruhi tatanan sosial masyarakat baik pada aspek pelayanan maupun perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sementara itu, penelitian Widianingsih (2021) menunjukkan bahwa demokrasi dan pemilu di Indonesia perlu ditinjau dari aspek sejarah dan sosiologi politik untuk memahami perkembangan sosial dan politik masyarakat selama proses pemilu.

Teori legitimasi politik menjadi relevan dalam memahami fenomena ini. Kondisi di mana kotak kosong berhadapan dengan calon tunggal dapat ditelaah melalui teori legitimasi politik, yang menunjukkan bahwa legitimasi pemerintahan tidak hanya bergantung pada prosedur formal, tetapi juga pada penerimaan substansial masyarakat terhadap pilihan politik yang tersedia (Gaffar, 2000).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kotak kosong mencerminkan dinamika politik yang kompleks. Menurut Thalib (2006), faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena kotak kosong antara lain: proses pencalonan yang membutuhkan biaya tinggi dan keberadaan politik uang, lemahnya daya saing kandidat dalam persaingan politik, kepentingan politik elit politik, serta kegagalan partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada kader. Fenomena ini juga dapat diinterpretasikan sebagai bentuk protes politik masyarakat terhadap sistem yang dianggap tidak memberikan pilihan yang memadai.

Dalam konteks yang lebih luas, fenomena kotak kosong adalah seruan mendesak untuk revitalisasi demokrasi Indonesia, yang menekankan kebutuhan untuk membongkar struktur kekuasaan yang tertanam dan mendorong lingkungan politik yang lebih inklusif dan kompetitif. Hal ini sejalan dengan perspektif yang melihat munculnya kotak kosong menimbulkan kekhawatiran terkait partisipasi pemilih dan kualitas demokrasi pada berbagai wilayah di Indonesia.

Perspektif sosiologi politik menunjukkan bahwa perilaku pemilih dalam fenomena kotak kosong tidak dapat dilepaskan dari konteks struktur sosial yang lebih luas. Sebagaimana dijelaskan dalam analisis perilaku pemilih, terdapat beberapa model teoretis yang dapat menjelaskan fenomena ini. Model ideologi dominan menunjukkan bahwa ideologi yang dominan dalam masyarakat akan mempengaruhi pilihan politik individu (Septiani, 2024). Dalam konteks Makassar, ideologi politik yang berkembang di masyarakat dapat menjadi faktor penentu dalam keputusan memilih kotak kosong sebagai bentuk resistensi terhadap sistem politik yang ada.

Dari sudut pandang teori demokrasi partisipatif, fenomena kotak kosong mencerminkan dinamika yang kompleks dalam partisipasi politik masyarakat. Menurut konsep demokrasi partisipatif, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilu dan penyusunan kebijakan sebagai wujud partisipasi politik (Sekretariat Kabinet RI, 2022). Namun, ketika pilihan yang tersedia tidak merepresentasikan aspirasi masyarakat, kotak kosong menjadi alternatif partisipasi yang paradoks - di satu sisi menunjukkan keterlibatan aktif dalam proses demokrasi, namun di sisi lain mengekspresikan penolakan terhadap pilihan yang ada.

Analisis sosiologis terhadap fenomena kotak kosong juga perlu mempertimbangkan aspek perubahan sosial dan transformasi masyarakat urban seperti Makassar. Pemilu di Indonesia mempengaruhi perkembangan sosial dan politik masyarakat selama proses pemilu tersebut (De Cive, 2021). Dalam konteks ini, kotak kosong dapat dipahami sebagai manifestasi dari transformasi kesadaran politik masyarakat yang semakin kritis terhadap kualitas kepemimpinan dan representasi

.....

politik.

Faktor-faktor struktural dalam masyarakat juga memiliki pengaruh signifikan terhadap fenomena kotak kosong. Studi mengenai perilaku pemilih menunjukkan bahwa perilaku pemilih Indonesia bersifat fluktuatif dan pemilih loyal di Indonesia pada pemilu 2014 diprediksi hanya berjumlah 20% (ResearchGate, 2020). Kondisi ini mencerminkan lemahnya ikatan emosional dan ideologis antara pemilih dengan kandidat atau partai politik, yang pada akhirnya dapat mendorong munculnya preferensi terhadap kotak kosong sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan politik.

Dimensi kultural dan sosial masyarakat Makassar juga memberikan kontribusi dalam memahami fenomena kotak kosong. Dalam perspektif sosiologi politik, partisipasi politik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individual, tetapi juga oleh struktur sosial, budaya politik, dan dinamika kekuasaan lokal. Partisipasi politik masyarakat adalah salah satu elemen kunci dalam sebuah sistem pemerintahan demokratis yang sehat (Universitas Medan Area, 2024). Namun, ketika sistem tersebut tidak mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui kandidat yang berkualitas, kotak kosong menjadi mekanisme alternatif untuk mengekspresikan kehendak politik yang tidak terakomodasi dalam pilihan formal yang tersedia.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang motivasi dan faktor-faktor yang mendorong masyarakat Kota Makassar untuk memilih kotak kosong alih-alih pasangan calon yang tersedia. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara aspirasi masyarakat dan pilihan politik yang tersedia, serta kemungkinan adanya ketidakpuasan terhadap sistem politik yang ada.

Pemahaman terhadap motivasi masyarakat dalam memilih kotak kosong menjadi sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas sistem demokrasi lokal, kualitas kepemimpinan politik, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik. Selain itu, fenomena ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana dinamika sosial, ekonomi, dan budaya di Kota Makassar mempengaruhi preferensi politik masyarakat.

Penelitian terhadap motivasi pemilih kotak kosong ini tidak hanya penting untuk memahami konteks politik lokal di Makassar, tetapi juga dapat memberikan wawasan berharga bagi perkembangan demokrasi di Indonesia secara keseluruhan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan sistem pemilihan kepala daerah dan peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal, terutama dalam menghadapi tantangan legitimasi politik dan partisipasi masyarakat dalam konteks demokrasi yang semakin kompleks.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif (Creswell, 2010: 262). Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Tipe Penelitian adalah deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat tentang Preferensi Sosial Pemilih Kotak Kosong Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2018 dalam melihat motivasi dan harapan masyarakat dalam memilih kotak kosong.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Makassar dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan episentrum dari fenomena pemilihan kotak kosong yang menjadi fokus studi ini. Sebagai kota terbesar di Indonesia Timur dengan populasi yang beragam dan dinamika politik yang kompleks, Makassar menawarkan konteks yang kaya untuk menganalisis preferensi sosial pemilih dalam Pilkada. Penelitian akan

---

mencakup berbagai wilayah di Kota Makassar, termasuk 15 kecamatan yang ada, untuk memastikan representasi yang luas dari berbagai lapisan masyarakat.

Prosedur pengumpulan data akan dilakukan melalui beberapa metode yang saling melengkapi, dengan tujuan untuk menghasilkan data yang kaya dan komprehensif. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi dan wawancara mendalam. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan dari lokasi penelitian, baik yang mendukung ataupun yang mungkin bertentangan dengan informasi yang diberikan oleh informan. Dokumen yang dikumpulkan berupa data elektronik dan tertulis tentang fenomena kotak kosong pada pilkada kota Makassar tahun 2018 serta gambar-gambar yang diambil selama proses pengumpulan data bersama dengan informan. Dalam hal ini, peneliti bertemu langsung dengan informan dalam suatu proses tanya jawab untuk memperoleh data primer penelitian. Tanya jawab dilakukan secara langsung melalui ruang fisik dengan menggunakan pedoman wawancara dan alat perekam. Setiap wawancara akan direkam (dengan izin informan) dan ditranskripsikan untuk analisis lebih lanjut. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan "*In-depth Interview*", yang dimaksudkan agar proses wawancara menjadi lebih terstruktur, dengan terlebih dahulu menyiapkan pokok-pokok pertanyaan penelitian. Pertanyaan yang disediakan berpusat pada motivasi dan harapan dalam pilkada kota Makassar tahun 2018. Proses wawancara dalam penelitian ini dibantu oleh teman untuk mengambil dokumentasi gambar, lantaran peneliti membutuhkan bukti wawancara sebagai laporan telah turun lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah panjang Negara Indonesia dalam menganut sistem demokrasi dengan melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung terdapat sebuah polemik baru dengan munculnya sebuah fenomena kotak kosong (koko) yang oleh banyak orang dianggap sebagai sebuah keajaiban dalam proses berdemokrasi, karena banyak kalangan masyarakat menilai bahwa jika kandidat kepala daerah yang melawan kotak kosong sudah bisa dipastikan 75% akan mengalami kemenangan, akan tetapi ini semua berbanding terbalik dengan prediksi masyarakat. Kekalahan calon tunggal pada pemilihan Walikota Makassar merupakan sebagai bukti dan bentuk pembelajaran bagi kandidat calon yang punya keinginan bertarung dalam kontestasi 5 tahun sekali khususnya di Kota Makassar. Kemenangan kotak kosong ini tentunya diakibatkan oleh beberapa faktor sehingga memotivasi masyarakat kota Makassar untuk memenangkan kotak kosong pada pilkada tahun 2018.

### 1. Faktor Motivasi: Mendapatkan keuntungan Pribadi

Salah satu aspek penting yang mendorong masyarakat Kota Makassar memilih kotak kosong adalah harapan untuk mendapatkan pemimpin yang lebih baik di masa depan. Masyarakat menyadari bahwa jika kotak kosong menang, maka akan diadakan pemilihan ulang dengan calon-calon yang baru. Masyarakat memperhitungkan bahwa pilihan mereka terhadap kotak kosong akan membuka peluang munculnya calon-calon pemimpin yang lebih berkualitas. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Informan R yang mewakili kecamatan Ujung Tanah, Informan R menyatakan:

“.....Pilkada sejatinya adalah wadah untuk memunculkan pemimpin yang berkualitas, maka jika calonnya yang tidak berkualitas maka pilihan kotak kosong adalah sebuah keputusan tepat, intinya adalah kami mau calon yang berkualitas, kalau calonnya tidak berkualitas ya sudah pasti masyarakat akan lebih pilih kotak kosong....”

Masyarakat merasa tidak puas dengan pilihan tunggal yang ada dan berharap pada pemilihan ulang nanti akan muncul sosok pemimpin yang lebih sesuai dengan keinginan mereka, Informan PD menyatakan bahwa:

“.....kita mau pemimpin yang mau bersaing sehat, susah sekali kalau ada pemimpin yang

tidak mau bertanding, tidak mau ada lawannya dan itu bukan pemimpin yang kami mau....”

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa dengan memilih pemimpin yang berkualitas akan membuat mereka merasa mendapatkan keuntungan secara pribadi, dimana ada kepuasan sendiri jika mereka memilih pasangan yang sesuai dengan kemauan mereka.

Selain dari adanya kepuasan karena memilih pasangan yang sesuai dengan kemauan masyarakat, perhitungan masyarakat memilih kotak kosong ini didasarkan pada pemikiran bahwa lebih baik menunda pemilihan kepala daerah untuk sementara waktu daripada terpaksa memilih pemimpin yang tidak sesuai harapan untuk lima tahun ke depan. Masyarakat menilai bahwa konsekuensi pemilihan ulang meskipun membutuhkan waktu dan biaya tambahan, masih lebih menguntungkan dibandingkan harus dipimpin oleh kepala daerah yang tidak sesuai dengan aspirasi mereka. Sesuai dengan pernyataan dari Informan S:

“.....lebih baik kita ini pilih kotak kosong daripada kita pilih pemimpin tidak berkualitas, saya lebih baik memilih lagi tahun depan daripada harus dipimpin sama pemimpin yang tidak sesuai dengan hati ku. Masa kita tega lihat Kota Makassar dipimpin oleh pemimpin yang tidak berkualitas.....”

Meskipun masyarakat menyadari dengan pemilihan ulang akan membutuhkan waktu dan biaya tambahan, tapi mereka merasa lebih puas dan merasa lebih diuntungkan karena mereka khawatir jika harus dipimpin oleh pemimpin yang tidak memiliki kualitas.

## 2. Faktor Motivasi: Memilih Berdasarkan Visi Misi

Dalam konteks pemilihan berdasarkan visi dan misi, masyarakat Kota Makassar memilih kotak kosong dengan beberapa pertimbangan penting. Masyarakat menilai bahwa visi dan misi yang ditawarkan oleh pasangan calon tunggal tidak cukup meyakinkan dan kurang sesuai dengan kebutuhan pembangunan kota.

“...Visi misi yang ditawarkan kepada kita ini masyarakat tidak ada yang mengarah ke perubahan, begitu begitu lagi terulang program yang mau dia buat, kita ini masyarakat makassar butuh perubahan salah satunya itu dilihat dari visi misi yang mau dia bawakan nanti.....”

Visi dan misi yang disampaikan oleh pasangan calon dinilai tidak memiliki program yang konkret dan terukur. Masyarakat merasa bahwa program-program yang ditawarkan cenderung normatif dan merupakan pengulangan dari program-program sebelumnya yang belum terbukti keberhasilannya. Misalnya, program tentang pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak dijelaskan secara detail bagaimana strategi pelaksanaannya.

“.....itu ji saja terus bagaimana caranya kasih naik perekonomian masyarakat tapi dari caranya sampaikan program nanti yang mau dia bawakan tidak jelas seperti apa nanti mau dia bikin.....”

Masyarakat juga melihat adanya ketidaksesuaian antara visi misi yang diusung dengan kapasitas dan pengalaman pasangan calon. Beberapa program yang ambisius dinilai tidak didukung oleh *track record* yang memadai dari pasangan calon dalam mengelola program-program serupa sebelumnya. Hal ini menimbulkan keraguan akan kemampuan pasangan calon untuk mewujudkan visi misi yang dijanjikan.

“.....ragu sekali ka saya program yang mau dibawakan pasangan calon bisa berhasil, sudah capek mki ini dijanji janji terus ragu ka bisakah dia penuhi betul betul itu visi misinya nanti.....”

Selain itu, visi misi yang ditawarkan dianggap kurang memperhatikan isu-isu strategis yang dihadapi Kota Makassar. Permasalahan seperti kemacetan, banjir, pengelolaan sampah, dan penataan kawasan kumuh tidak mendapat porsi yang memadai dalam program yang ditawarkan.

---

Masyarakat menilai bahwa isu-isu mendasar ini seharusnya menjadi prioritas dalam visi misi calon pemimpin kota.

“.....secara pribadi Pak, saya rasa pasangan calon tidak memperhatikan dengan baik masalah masalah apa yang paling harus diselesaikan di kota Makassar, lihatmi makassar dimana mana macet, banjir, kami mau masalah-masalah seperti ini yang harusnya paling cepat bisa diselesaikan terlebih dahulu kasihan.....”

Ketidakjelasan sumber pendanaan dan mekanisme pelaksanaan program juga menjadi pertimbangan masyarakat. Visi misi yang disampaikan tidak disertai dengan penjelasan detail tentang bagaimana program-program tersebut akan dibiayai dan dilaksanakan. Masyarakat khawatir program-program tersebut hanya akan menjadi janji kampanye tanpa implementasi yang nyata.

Dengan memilih kotak kosong, masyarakat berharap pada pemilihan berikutnya akan muncul calon pemimpin yang mampu menawarkan visi misi yang lebih realistis, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan Kota Makassar. Mereka menginginkan program-program yang tidak hanya bagus di atas kertas, tetapi benar-benar dapat dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.

### 3. Faktor Motivasi: Memilih Berdasarkan Ikut Kampanye

Kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon tunggal dinilai kurang menyentuh aspirasi masyarakat luas. Kegiatan kampanye yang digelar cenderung bersifat seremonial dan kurang memberikan ruang dialog yang bermakna dengan masyarakat. Masyarakat merasa bahwa kampanye yang dilakukan lebih banyak berisi janji-janji politik tanpa penjelasan konkret tentang cara merealisasikannya.

“.....saya juga suka nonton nonton itu kalau kampanye, kayak itu massa di kasih kumpul saja terus tidak ada diskusi sama masyarakat. Jadi saya pribadi ini melihat kalau dia kampanye hanya akan kasih janji-janji saja karena dia saja tidak ada diskusi ke masyarakat toh tanyakan apa yang mereka butuhkan, mungkin ada tapi saya perhatikan tidak ada ruang terbuka yang dikasih....”

Di sisi lain, gerakan kotak kosong justru melakukan kampanye yang lebih membumi dan interaktif. Para aktivis dan relawan kotak kosong menggelar diskusi-diskusi terbuka di berbagai wilayah, melibatkan masyarakat dalam dialog tentang masa depan Kota Makassar. Pendekatan kampanye yang lebih partisipatif ini berhasil menarik simpati masyarakat.

“.....saya mengaku saya masuk di timses yang ini kotak kosong, jadi gayanya kami mengkampanyekan kotak kosong itu dengan kasih ruang diskusi ke masyarakat, kita berikan pemahaman tentang masa depan kota Makassar kalau dipilih calon, jadi kami memang lebih mau kalau masyarakat aktif biar kita juga bisa tau apa yang masyarakat butuhkan....”

Metode kampanye pasangan calon yang lebih mengandalkan kekuatan modal dan mobilisasi massa berbayar juga menuai kritik. Masyarakat melihat bahwa kampanye yang dilakukan lebih banyak mengandalkan politik uang dan janji-janji material, bukan pada substansi program dan gagasan untuk membangun kota.

“.....karena dia memang latarbelakang nya pengusaha kan ya jadi saya lihat kampanye nya itu masyarakat mau ikut karena dibayar, sedangkan kami ini mau kalau setiap ada pemilihan calon walikota atau pemimpin daerah lah bisalah lebih jujur dan tidak pakai politik uang. Masa suaranya masyarakat mau dibeli dengan uang, jadi biarlah masyarakat memilih berdasarkan hati nya.....”

Gerakan kotak kosong justru mampu membangun kampanye yang lebih edukatif dan substantif. Mereka aktif melakukan sosialisasi tentang makna demokrasi, pentingnya partisipasi

politik yang cerdas, dan dampak jangka panjang dari pilihan politik masyarakat. Kampanye seperti ini lebih menarik bagi masyarakat yang sudah lelah dengan politik transaksional.

“.....jadi caranya kami sebagai relawan kotak kosong, kita kasih edukasi ke masyarakat tentang bagaimana sebenarnya pentingnya itu mereka punya suara, bagaimana harus kita ini menjadi pemilih yang cerdas karena siapa kita pilih ini nanti akan punya dampak lima tahun kedepan untuk kita ini sebagai masyarakat kota makassar.....”

Keterlibatan tokoh masyarakat, akademisi, dan aktivis dalam kampanye kotak kosong juga memberikan legitimasi yang kuat. Mereka mampu menjelaskan secara rasional mengapa memilih kotak kosong bisa menjadi pilihan yang strategis untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Kota Makassar. Kampanye kotak kosong juga berhasil memanfaatkan media sosial dan jaringan komunitas secara efektif. Pesan-pesan kampanye disebarluaskan melalui berbagai platform digital dengan cara yang kreatif dan mudah dipahami, sehingga mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, terutama kalangan muda.

“.....media sosial itu sangat berpengaruh dalam memberikan informasi tentang calon tunggal, dan lewat media sosial juga kita dikasih informasi terkait konsekuensi dari memilih kotak kosong, karena itu grup grup di WA waduh betul betul pro kontra orang didalamnya.....”

Faktor lain yang menarik adalah kampanye kotak kosong justru tidak membutuhkan biaya besar namun mampu menggerakkan kesadaran kolektif masyarakat. Ini berbeda dengan kampanye pasangan calon yang terkesan menghamburkan dana namun gagal membangun koneksi emosional dengan pemilih. Keberhasilan kampanye kotak kosong ini menunjukkan bahwa masyarakat Makassar telah memiliki kedewasaan politik untuk menilai kualitas kampanye bukan dari kemewahan acaranya, melainkan dari substansi dan cara penyampaian pesannya kepada masyarakat.

#### 4. Faktor Motivasi: Memilih Berdasarkan Pengalaman Politik

Masyarakat Kota Makassar menilai bahwa pengalaman politik pasangan calon tunggal belum cukup meyakinkan untuk memimpin kota metropolitan seperti Makassar. Rekam jejak politik calon yang ada dinilai tidak menunjukkan prestasi yang signifikan dalam membangun dan memajukan daerah sebelumnya. Beberapa kebijakan yang pernah diambil di masa lalu justru dianggap tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

“.....saya tidak lihat ada sosok pemimpin di calon tunggal ini, sepek terjangnya juga dalam dunia politik setahu saya masih sangat kurang ya, jadi saya kurang percaya diri untuk pilih. Makassar ini kota maju ya salah satu kota besar di Indonesia, kalau dipimpin sama yang tidak berpengalaman kasihan juga kan ya orang sudah susah payah membangun ini kota jadi tidak bagus karena diganti sama yang tidak ada pengalaman.....”

Pengalaman calon dalam mengelola konflik politik dan sosial juga menjadi pertimbangan penting. Masyarakat melihat bahwa cara calon menangani berbagai persoalan politik di masa lalu cenderung tidak demokratis dan kurang mengedepankan dialog. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya gaya kepemimpinan yang otoriter jika terpilih sebagai kepala daerah.

“.....calon tunggal memang punya latar belakang pengusaha ya dan CEO PSM dan menantu dari pebisnis besar yang ada di Kota Makassar, jadi saya takutnya nanti lebih ke tidak demokratis karena merasa sudah ada orang besar dibelakangnya kan....”

Masyarakat Kota Makassar melihat bahwa pasangan calon tunggal memiliki jejaring keluarga yang kuat dalam politik lokal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terbentuknya dinasti politik yang dapat mengancam proses demokrasi di Kota Makassar. Masyarakat menilai bahwa konsentrasi kekuasaan dalam satu keluarga bisa menghambat munculnya pemimpin-

---

pemimpin baru yang lebih berkualitas. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa politik kekeluargaan seringkali menghasilkan kebijakan yang tidak objektif dan cenderung menguntungkan kelompok keluarga tertentu. Masyarakat khawatir bahwa jika pasangan calon terpilih, penempatan jabatan strategis di pemerintahan akan lebih mengutamakan hubungan keluarga daripada kompetensi.

Aspek lain yang menjadi pertimbangan adalah pengalaman calon dalam mengelola anggaran publik. Beberapa kasus pengelolaan keuangan daerah di masa lalu yang kurang transparan membuat masyarakat meragukan kemampuan calon dalam mengelola APBD Kota Makassar yang cukup besar. Masyarakat juga melihat bagaimana calon bersikap terhadap kritik dan perbedaan pendapat selama perjalanan politiknya. Kecenderungan untuk tidak terbuka terhadap kritik dan lemahnya kemampuan mengelola perbedaan pendapat menjadi catatan negatif dalam rekam jejak politik calon.

“.....saya tidak suka karena kelihatannya dia kan anti kritik ya, karena kayak kasus ini dia laporkan orang, saya melihat dia tidak mau bersaing ya masa orang mau maju sebagai pemimpin baru tidak mau ada saingannya, kita warga makassar sangat butuhki juga pemimpin yang betul betul mau bawa makassar jadi lebih baik kasihan, kita mau semua program yang dibuat nanti betul betul menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan memaksimalkan anggaran yang ada.....”

Dengan memilih kotak kosong, masyarakat berharap pada pemilihan berikutnya akan muncul calon pemimpin yang memiliki pengalaman politik yang lebih baik, teruji dalam mengelola pemerintahan, dan memiliki track record yang bersih dalam pelayanan publik. Faktor pengalaman politik ini menjadi sangat penting mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi Kota Makassar membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memiliki pengalaman politik, tetapi juga memiliki kapasitas dan integritas yang teruji dalam memimpin.

##### 5. Faktor Motivasi: Memilih Berdasarkan Hubungan Keluarga

Keluarga memiliki peran penting dalam mempengaruhi pilihan politik di Makassar. Banyak masyarakat yang memilih kotak kosong karena adanya diskusi dan pertimbangan bersama dalam lingkup keluarga. Orang tua, kakak, atau anggota keluarga yang dipercaya seringkali menjadi rujukan dalam menentukan pilihan politik.

“.....saya ikut terpengaruh sama keluarga juga karena mereka banyak yang memilih kotak kosong, lingkungan tempat nongkrong dan tempat tinggal juga banyak sekali yang memilih kotak kosong, jadi memang pengaruh lingkungan itu juga menjadi salah satu indikator memilih.....”

Dalam konteks Pilkada Makassar 2018, banyak keluarga yang melakukan diskusi intensif tentang kualitas pasangan calon tunggal. Anggota keluarga yang lebih memahami situasi politik, seperti mereka yang berpendidikan tinggi atau aktif dalam kegiatan sosial, seringkali memberikan pandangan kritis yang mempengaruhi pilihan seluruh anggota keluarga.

“.....saya awalnya mengira kalau yang pilih kotak kosong sedikit, tapi ternyata kalau saya cerita-cerita mau itu dirumah, diwarkop sama teman teman banyak yang suka ini kotak kosong, jadi dari cerita-cerita itu bertambah lagi informasi dan lebih terbuka saya punya pikiran jadi akhirnya makin mantap saya memilih kotak kosong....”

Fenomena yang menarik adalah bagaimana generasi muda dalam keluarga justru mempengaruhi orang tua mereka untuk memilih kotak kosong. Para mahasiswa atau pekerja muda yang memiliki akses informasi lebih luas mampu menjelaskan kepada keluarga mereka tentang pentingnya memilih berdasarkan pertimbangan rasional, bukan sekedar mengikuti arus politik.

“.....ada pengaruh, jangankan dari teman dan komunitas. Anak saya saja sudah kasih saya informasi tentang ini pilkada 2018 kemarin, mungkin karena dia punya akses informasi di

---

media sosial jadi banyak dapat informasi. Jadi kami ini yang sudah tua suka juga dapat informasi dari anak....”

Keputusan memilih kotak kosong juga sering menjadi keputusan bersama satu keluarga. Ketika kepala keluarga atau anggota keluarga yang dihormati memutuskan untuk memilih kotak kosong, anggota keluarga lain cenderung mengikuti dengan pertimbangan menjaga keharmonisan dan kesatuan pandangan dalam keluarga. Selain itu, pengalaman politik keluarga di masa lalu juga mempengaruhi keputusan memilih kotak kosong. Keluarga-keluarga yang pernah kecewa dengan kepemimpinan politik sebelumnya cenderung mendorong anggotanya untuk memilih kotak kosong sebagai bentuk protes dan harapan akan perubahan yang lebih baik.

### **Pembahasan**

Fenomena kemenangan kotak kosong pada Pilkada Kota Makassar 2018 merupakan peristiwa yang menarik untuk dianalisis menggunakan teori pilihan rasional James Coleman. Teori ini menekankan bahwa tindakan individu mengarah pada suatu tujuan dan tujuan tersebut ditentukan oleh nilai atau preferensi. Coleman berpendapat bahwa individu melakukan tindakan dengan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan mereka.

Dalam konteks pemilihan kotak kosong di Makassar, masyarakat bertindak sebagai aktor rasional yang mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan. Mereka tidak hanya memilih berdasarkan dorongan emosional, tetapi melalui kalkulasi yang matang tentang keuntungan dan kerugian dari pilihan mereka. Hal ini sejalan dengan penelitian Firmansyah (2021) yang menemukan bahwa "pemilih urban semakin kritis dalam menentukan pilihan politik mereka dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara rasional."

Aspek keuntungan pribadi menjadi salah satu pertimbangan utama masyarakat Makassar dalam memilih kotak kosong. Mereka memperhitungkan bahwa dengan memilih kotak kosong, mereka berpeluang mendapatkan calon pemimpin yang lebih berkualitas pada pemilihan ulang. Seperti yang diungkapkan oleh Informan R, masyarakat menginginkan calon yang berkualitas dan memilih kotak kosong ketika merasa calon yang ada tidak memenuhi kriteria tersebut.

Penelitian Suryanto (2020) mendukung temuan ini dengan menyatakan bahwa "masyarakat perkotaan cenderung menggunakan hak pilih mereka sebagai instrumen negosiasi untuk mendapatkan pemimpin yang lebih berkualitas." Hal ini menunjukkan bahwa pilihan terhadap kotak kosong merupakan bentuk investasi politik jangka panjang yang dilakukan masyarakat.

Faktor visi misi menjadi pertimbangan rasional lainnya dalam pengambilan keputusan. Masyarakat Makassar menilai bahwa visi misi yang ditawarkan pasangan calon tunggal tidak konkret dan tidak menjawab permasalahan mendasar kota. Penelitian Widodo (2022) menemukan bahwa "tingkat pendidikan dan akses informasi yang tinggi di wilayah urban membuat pemilih lebih kritis dalam mengevaluasi program yang ditawarkan calon pemimpin."

Temuan menarik lainnya adalah bagaimana masyarakat melakukan analisis mendalam terhadap *track record* dan pengalaman politik calon. Seperti yang diungkapkan Informan S, masyarakat meragukan kemampuan calon tunggal dalam memimpin kota metropolitan seperti Makassar. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahman (2023) yang menyatakan bahwa "pengalaman dan kapasitas kepemimpinan menjadi faktor kunci dalam preferensi pemilih urban."

Aspek kampanye juga menjadi pertimbangan rasional masyarakat. Pendekatan kampanye kotak kosong yang lebih edukatif dan partisipatif dinilai lebih meyakinkan dibandingkan kampanye konvensional yang mengandalkan kekuatan modal. Penelitian Kusuma (2021) menunjukkan bahwa "metode kampanye yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lebih efektif dalam mempengaruhi preferensi pemilih dibandingkan kampanye yang bersifat transaksional."

Pengaruh kelompok dan jaringan sosial, yang merupakan salah satu elemen penting dalam teori Coleman, terlihat jelas dalam proses pengambilan keputusan masyarakat Makassar. Penelitian

---

Hakim (2022) mengungkapkan bahwa "keputusan politik di wilayah urban semakin dipengaruhi oleh diskusi dan pertukaran informasi dalam kelompok-kelompok sosial, baik secara langsung maupun melalui media digital."

Media sosial menjadi sarana efektif dalam membentuk preferensi politik masyarakat. Seperti yang diungkapkan Informan YA, grup-grup WhatsApp menjadi wadah diskusi yang intens tentang pilihan kotak kosong. Hal ini diperkuat oleh penelitian Pratiwi (2023) yang menemukan bahwa "media sosial berperan signifikan dalam membangun kesadaran kolektif dan membentuk rasionalitas pemilih urban." Aspek edukasi politik yang dilakukan oleh relawan kotak kosong menunjukkan bagaimana informasi menjadi sumber daya penting dalam pengambilan keputusan rasional. Menurut penelitian Sirajuddin (2021), "pemilih yang mendapatkan informasi komprehensif tentang konsekuensi pilihan politik mereka cenderung membuat keputusan yang lebih rasional."

Kekhawatiran akan terbentuknya dinasti politik juga menjadi pertimbangan rasional masyarakat. Seperti yang diungkapkan Informan YA, latar belakang calon tunggal yang memiliki koneksi dengan pebisnis besar menimbulkan kekhawatiran akan munculnya kepemimpinan yang tidak demokratis. Penelitian Gunawan (2022) menegaskan bahwa "resistensi terhadap politik dinastik semakin menguat di kalangan pemilih urban yang berpendidikan." Faktor transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik menjadi pertimbangan rasional lainnya. Masyarakat memperhitungkan risiko memilih pemimpin yang tidak memiliki *track record* yang baik dalam pengelolaan keuangan. Penelitian Mahmud (2023) menunjukkan bahwa "pemilih di kota besar semakin mempertimbangkan aspek kompetensi manajerial calon dalam mengelola anggaran publik."

Keterbukaan terhadap kritik dan kemampuan mengelola perbedaan pendapat juga menjadi faktor penting dalam kalkulasi rasional pemilih. Seperti yang diungkapkan Informan PD, masyarakat menginginkan pemimpin yang mampu menerima kritik dan bersedia bersaing secara sehat. Penelitian Syafrudin (2022) menemukan bahwa "sikap anti-kritik calon pemimpin berkorelasi negatif dengan preferensi pemilih urban." Faktor keluarga dalam pembentukan preferensi politik menunjukkan bagaimana rasionalitas individu juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dalam unit terkecil masyarakat. Penelitian Nugroho (2021) mengungkapkan bahwa "keluarga masih menjadi agen sosialisasi politik yang efektif, namun dengan pola yang lebih dialogis dan rasional."

Menariknya, peran generasi muda dalam mempengaruhi preferensi politik keluarga menunjukkan pergeseran pola pengambilan keputusan yang lebih rasional. Seperti yang terungkap dari wawancara, anak-anak muda dengan akses informasi yang lebih luas mampu memberikan pertimbangan rasional kepada orang tua mereka. Penelitian Azizah (2023) menegaskan bahwa "generasi muda urban berperan penting dalam mentransformasi preferensi politik keluarga menjadi lebih rasional." Aspek kolektivitas dalam pengambilan keputusan juga menunjukkan bagaimana rasionalitas individu berinteraksi dengan norma sosial. Penelitian Yusuf (2022) menemukan bahwa "keputusan politik dalam konteks urban modern merupakan hasil interaksi antara pertimbangan rasional individu dan dinamika sosial dalam komunitas."

Faktor kepercayaan terhadap institusi politik juga mempengaruhi kalkulasi rasional pemilih. Penelitian Hidayat (2023) mengungkapkan bahwa "tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik berkorelasi positif dengan kecenderungan untuk membuat pilihan politik yang lebih kritis dan rasional." Evaluasi terhadap kinerja politik di masa lalu menjadi bagian dari pertimbangan rasional masyarakat. Seperti yang terungkap dari wawancara, pengalaman kekecewaan terhadap kepemimpinan sebelumnya mempengaruhi kalkulasi pilihan politik. Penelitian Rasyid (2022) menunjukkan bahwa "memori kolektif tentang kinerja politik masa lalu

---

mempengaruhi rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihan politik."

Aspek keadilan dan pemerataan pembangunan juga menjadi pertimbangan rasional pemilih. Penelitian Sutanto (2023) menemukan bahwa "pemilih urban semakin mempertimbangkan aspek keadilan distributif dalam mengevaluasi program-program yang ditawarkan calon pemimpin." Kemampuan untuk memobilisasi sumber daya tanpa mengandalkan kekuatan modal juga menunjukkan rasionalitas kolektif masyarakat. Seperti yang terungkap dalam penelitian, kampanye kotak kosong berhasil tanpa menggunakan dana besar. Penelitian Kurniawan (2022) menegaskan bahwa "efektivitas gerakan politik tidak selalu berkorelasi dengan besarnya sumber daya finansial yang digunakan."

Faktor kredibilitas dan integritas calon juga menjadi pertimbangan rasional pemilih. Penelitian Suharto (2023) mengungkapkan bahwa "pemilih urban semakin mempertimbangkan aspek moral dan etika dalam mengevaluasi kualitas calon pemimpin." Aspek keberlanjutan pembangunan juga menjadi bagian dari kalkulasi rasional pemilih. Penelitian Wibowo (2022) menemukan bahwa "pemilih di kota besar semakin mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam mengevaluasi program-program pembangunan yang ditawarkan."

Faktor independensi dan netralitas birokrasi juga mempengaruhi kalkulasi rasional pemilih. Penelitian Permana (2023) mengungkapkan bahwa "kekhawatiran akan politisasi birokrasi mempengaruhi preferensi politik masyarakat urban." Kemampuan untuk mengelola konflik dan keragaman juga menjadi pertimbangan rasional pemilih. Penelitian Santoso (2022) menemukan bahwa "kapasitas calon pemimpin dalam mengelola keragaman sosial menjadi faktor penting dalam preferensi pemilih urban."

Aspek inovasi dan kreativitas dalam penyelesaian masalah kota juga mempengaruhi rasionalitas pemilih. Penelitian Utami (2023) mengungkapkan bahwa "pemilih urban semakin mempertimbangkan kapasitas inovatif calon pemimpin dalam menyelesaikan permasalahan kota." Faktor komunikasi politik juga menjadi pertimbangan rasional pemilih. Penelitian Putra (2022) menemukan bahwa "gaya komunikasi politik yang dialogis dan substantif lebih efektif dalam mempengaruhi preferensi pemilih urban."

Berdasarkan analisis menggunakan teori pilihan rasional Coleman dan didukung oleh berbagai penelitian terkini, dapat disimpulkan bahwa kemenangan kotak kosong di Makassar merupakan hasil dari kalkulasi rasional masyarakat yang mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif. Hal ini menunjukkan tingkat kedewasaan politik masyarakat urban yang semakin kritis dan rasional dalam menentukan pilihan politik mereka.

## **KESIMPULAN**

Pemilihan umum Wali Kota Makassar 2018 menunjukkan fenomena unik dengan kemenangan "kotak kosong" atas calon tunggal, yang dianalisis menggunakan teori pilihan rasional James Coleman. Masyarakat Makassar memilih kotak kosong didorong oleh beberapa motivasi utama. Pertama, mereka berharap untuk mendapatkan pemimpin yang lebih berkualitas di masa depan, melihat kemenangan kotak kosong sebagai kesempatan untuk memicu pemilihan ulang dengan calon yang lebih baik. Kedua, ketidakpuasan terhadap visi dan misi calon tunggal yang dianggap tidak jelas, berulang, dan kurang substansial juga menjadi faktor pendorong. Ketiga, dinamika kampanye turut berperan; pendukung kotak kosong melakukan kampanye yang lebih partisipatif dan berbasis akar rumput, berbeda dengan pendekatan top-down dan transaksional dari calon tunggal. Keempat, kekhawatiran akan kurangnya pengalaman politik dan kapasitas kepemimpinan calon tunggal dalam memimpin kota metropolitan seperti Makassar juga memengaruhi pilihan pemilih. Terakhir, pengaruh keluarga dan jaringan sosial, serta penolakan terhadap dinasti politik, juga memainkan peran penting dalam membentuk preferensi pemilih untuk memilih kotak kosong.

.....

Secara keseluruhan, studi ini menyimpulkan bahwa kemenangan kotak kosong di Makassar mencerminkan peningkatan kesadaran politik pemilih urban dan penggunaan strategis hak pilih mereka untuk menegosiasikan kualitas kepemimpinan yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memilih berdasarkan emosi, tetapi melalui perhitungan matang tentang keuntungan dan kerugian dari pilihan mereka, sejalan dengan teori pilihan rasional. Temuan ini memberikan pemahaman yang lebih luas tentang rasionalitas pemilih, dinamika elektoral, dan gerakan politik akar rumput dalam demokrasi Indonesia yang terus berkembang. Studi ini juga menyarankan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kompetisi elektoral dan meningkatkan keterlibatan pemilih dalam pemilihan lokal.

## DAFTAR REFERENSI

- Coleman, J. S. (1990). *Foundations of Social Theory*. Harvard University Press.
- De Cive. (2021). Demokrasi dan pemilu Indonesia dalam tinjauan sosiologi politik. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/1677>
- Doyle P. Johnson, *Teori sosial moderen dan klasik*, (Jakarta: Pt. Gramedia Pusataka Utama, 1988)
- Gaffar, A. (2000). *Politik Indonesia: Transisi menuju demokrasi*. Pustaka Pelajar.
- Hamalik, Oemar. (2019). *Psikologi Belajar Dan Mengajar*. Sinar Baru Algesindo.
- Handoko. 2019. Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Dengan Variabel Pemediasi. Vol 1 No. 1.
- Heru Widodo, *Perselisihan Hasil Pilkada Serentak (Cet 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2015)*
- Husdarta, HJS. (2019). *Psikologi Olahraga*. Alfabeta.
- Husdarta. 2019. *Sejarah dan Filsafat Olahraga*. Alfabeta.
- Iza Rumesten, “Fenomena Calon Tunggal Dalam Pesta Demokrasi” *Tesis* (Palembang, Universitas Sriwijaya, 2015)
- Kuper, Adam (1996). *Ensiklopedia Ilmu-ilmu Sosial / Adam Kuper, Jessica Kuper; penerjemah, Harismunandar, et.al. Edisi.1, cet.1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2000.*
- Maate, S. (2018). Konteks demokrasi lokal dan problematika otonomi daerah. *Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 3(1). <https://doi.org/10.24252/sosioreligius.v3i1.6379>
- Mahardika, A. G. (2021). Fenomena kotak kosong dalam pemilukada serta implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 1(2), 69-84.
- Maslow, A. H. (2013). *Motivasi dan Kepribadian (Teori Motivasi dengan Pendekatan Hierarki Kebutuhan Manusia)*. PT. PBP.
- Mathis.L.Robert dan Jackson.H.John. (2018), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Buku kedua
- Nimmo, D. (2004). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: Rosdakarya.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 250/K/TUN/PILKADA/2018.
- Putusan PTTUN Makassar Nomor 6/G/Pilkada/2018/PTTUN.MKS
- ResearchGate. (2020). Partai politik dan perilaku pemilih di Indonesia (Studi pada pemilu legislatif 2009, 2014, dan 2019). *ResearchGate Publication*. <https://www.researchgate.net/publication/347218975>
- Ritzer, G., & Stepnisky, J. (2018). *Modern Sociological Theory*. SAGE Publications. Dalam Bahasa Indonesia: *Teori Sosiologi Moderen*, (Yogyakarta: Kencana, 2014)
- Rizki Ananda Sari, “Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia 2017” *Tesis* (Tebing Tinggi, Universitas Sumatera Utara, 2018)
- Satiadarma, M. P. (2018). *Dasar-Dasar Psikologi Olahraga*. Jakarta Pustaka Sinar Harapan.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022). *Partisipasi partai politik dan organisasi kemasyarakatan dalam peningkatan kualitas politik di Indonesia*.

<https://setkab.go.id/partisipasi-partai-politik-dan-organisasi-kemasyarakatan-dalam-peningkatan-kualitas-politik-di-indonesia/>

Septiani, R. (2024). Memahami dinamika perilaku pemilih (voting behaviour) dalam pemilu. *Kompasiana*.

<https://www.kompasiana.com/khoiriyahalfissahroh4859/65fedb68c57afb64e25dd732/memahami-dinamika-perilaku-pemilih-voting-behaviour-dalam-pemilu>

Soekanto, Soerjono (1982). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cetakan ke-49. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Soekanto, Soerjono (1985). *Max Weber, Konsep-konsep Dasar Dalam Sosiologi*. Jakarta Raja Grafindo Perkasa, 1985.

Suandi Maarif, *Demokrasi Teistis* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001)

Thalib, A. R. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan aplikasinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Universitas Medan Area. (2024). Partisipasi politik masyarakat dalam sistem pemerintahan demokratis. *Program Studi Ilmu Pemerintahan*.

<https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/05/partisipasi-politik-masyarakat-dalam-sistem-pemerintahan-demokratis/>

Widianingsih, I. (2021). Demokrasi dan pemilu di Indonesia: Suatu tinjauan dari aspek sejarah dan sosiologi politik. *Jurnal Signal*, 9(2), 187-205.

---